

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Fitur penting dari diplomasi modern saat ini ialah meluasnya aktor yang terlibat di dalamnya. Dunia politik internasional saat ini telah mengalami banyak perubahan, baik dalam lingkup yang dibahas maupun aktor yang berperan. Sebelum perang dunia II tren aktor non-negara sebagai pelaku politik belum banyak menjadi sorotan. Padahal dalam dunia politik internasional yang saat ini kita kenal, aktor non-negara bahkan sudah mendapatkan tempatnya sendiri dalam mempengaruhi dinamika hubungan internasional. Aktor non-negara dalam hubungan internasional saat ini meliputi; *International Governmental Organization* (IGO) seperti *World Trade Organization* (WTO) dan *World Health Organization* (WHO), *Non-Governmental Organization* (NGO) seperti *World Wildlife Fund* (WWF) serta *Amnesty International*, *Multinational corporations* (MNC), *Transnational Corporations* (TNC), dan individu. Aktor non negara cenderung tidak berkaitan dengan segala aspek kenegaraan dan tidak diatur oleh negara atau pemerintahan tertentu, tetapi kerap kali aktor non-negara berupaya untuk mendekatkan diri dengan pemerintahan suatu negara.

Berbeda dengan IGOs yang terdiri dari pemerintahan resmi negara-negara, NGOs atau organisasi non-pemerintah merupakan organisasi yang bersifat independen atau tidak terkait dengan pemerintah. NGOs merupakan organisasi nirlaba atau non-profit dan terbentuk secara sukarela dalam suatu masyarakat. Tujuan pembentukan organisasi-organisasi ini bisa sebagai mitra atau pembantu pemerintah ataupun sebagai pengkritik atau pengontrol aktivitas pemerintah yang dirasa merugikan masyarakat. Pada beberapa contoh, NGOs

memiliki hubungan dekat dengan administrator negara (tergabung di delegasi, keuangan, atau melalui konsultasi dan intelegensi yang dibagi); yang lainnya beroperasi secara transnasional yang biasa disebut dengan *International Non-Governmental Organizations* (INGO), atau dalam beberapa kasus beroperasi di *twilight advocacy zone*.<sup>1</sup> NGOs pada umumnya terbentuk untuk memperjuangkan isu-isu non-tradisional atau permasalahan tertentu di dunia. Misalnya isu Hak Asasi Manusia (HAM), isu lingkungan, keamanan manusia, kejahatan transnasional, dan lain sebagainya.

Tidak dapat dipungkiri bahwa HAM merupakan isu yang muncul sebagai akibat dari tren liberalisme Barat yang memberatkan subyeknya pada individu. Sebagaimana yang dikemukakan oleh Lynn H. Miller, orang-orang yang dibesarkan dalam budaya Anglo-Amerika kemungkinan akan condong untuk beranggapan bahwa HAM dapat dijelaskan sebagai “*fundamental rights that can not be alienated even by the government.*” Hak-hak dasar ini dicantumkan pada *Universal Declaration of Human Rights* (UDHR) yang dibuat pada tahun 1948 di Paris. Kutipan dari UNDHR pada pasal 1 berbunyi;

*“All human beings are born free and equal in dignity and rights. They are endowed with reason and conscience and should act towards one another in a spirit of brotherhood.”*<sup>2</sup>

Deklarasi ini menjadi sangat terkenal, dan menjadi panduan bagi negara-negara di dunia, aktor-aktor dan institusi global dalam melindungi dan memperjuangkan HAM. Sedangkan menurut ahli, Rhona Smith, ada dua prinsip dasar yang menjadi awal mula dari teori hak asasi manusia, yakni *liberty-based theories* yang lazimnya berada dalam yurisdiksi

---

<sup>1</sup> R. P. Barston, 2014. *Modern Diplomacy, Fourth Edition*, New York: Routledge, hal. 8.

<sup>2</sup> Draft *Universal Declarations of Human Rights* dari *United Nation General Assembly*

hukum (*common law*) dan *the rights-based theories* dari sistem hukum sipil.<sup>3</sup> Kedua asal teori ini berusaha mengatur hubungan antara negara dan individu, berusaha mengatur campur tangan negara dalam kehidupan pribadi. Pada hakikatnya, *the liberty-based theories* menuntut agar individu bebas dari kesewenang-wenangan negara, sedangkan *the rights-based theories* didasarkan pada hak-hak dasar manusia yang melekat dan negara harus menghormati hak-hak tersebut. Meskipun demikian, dalam realitasnya, perjuangan ke arah penegakkan HAM masih pasang surut sebagai akibat dari perang, kekerasan politik, dan marginalisasi sistematis baik yang dilakukan oleh negara dan pasar.

Munculnya banyak kasus pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) saat ini dipicu oleh banyaknya aktor yang terlibat dalam hubungan politik. sebagaimana dikemukakan oleh Koen de Feyter,

*“In today’s globalized world, however, human rights violations often occur as a consequence of the behavior of a variety of actors.”*<sup>4</sup>

Terhitung dari tahun 1970, INGO mendalami aktivitas mereka dalam membela hukum tentang Hak Asasi Manusia. menurut diplomat Soviet pada tahun 1969, sebagai *‘weeds in the field’*, aktivitas INGO adalah permulaan untuk

---

<sup>3</sup> Rhona K.M Smith, 2005. *Textbook on International Human Rights, Second Edition*, New York: Oxford University Press, hal. 5. dalam *Dinamika Isu-Isu Global Kontemporer*.

<sup>4</sup> Koen de Feyter, 2005. *Human Rights: Social Justice in the Age of the Market*, London, New York: Zed Books, hlm. 1. dalam *Dinamika Isu-Isu Global Kontemporer*, hlm 219.

mendapatkan perubahan yang signifikan dalam hubungan *state-society* secara global.<sup>5</sup>

Amnesti Internasional adalah contoh yang paling baik. Misi dari organisasi ini adalah mengkampanyekan hak asasi manusia supaya dapat diterima secara global. Organisasi ini saat ini telah berada di lebih dari 120 negara dan memiliki lebih dari 7 juta pendukung yang tersebar di berbagai negara. *Amnesty International* dirintis tahun 1961 oleh Peter Benenson, seorang pengacara Inggris yang meluncurkan “Amnesty ’61”, sebuah kampanye yang membela dua mahasiswa Portugis yang dipenjara karena melakukan toso politik menggunakan gelas anggur. Benenson menulis pembelaan yang dicetak di koran-koran di seluruh dunia. Sebagai hasil dari kampanye, pada bulan Juli tahun 1961, delegasi dari berbagai negara bertemu dan memulai organisasi kemanusiaan ini. Gerakan global ini memiliki motto “*Only when the last prisoner of conscience has been freed, when the last torture chamber has been closed, when the United Nations Universal Declaration of Human Rights is a reality for the world’s people, will our work be done.*”<sup>6</sup> Sebagai organisasi formal, *Amnesty International* juga memiliki konstitusi dasar yang menjadi landasan gerak organisasinya, yakni *Statuta of Amnesty International*. Hal itulah yang mereka jadikan panduan untuk terus melaksanakan misi dalam memperjuangkan hak asasi manusia. Hingga saat ini, *Amnesty International* telah melakukan banyak aksi untuk

---

<sup>5</sup> D. P. Forsythe, 2012. *Human rights in international relations, Third edition., vol. Themes in International relations*. Cambridge: Cambridge University Press.

<sup>6</sup> Amnesty International, *Who we are*, <https://www.amnesty.org/en/who-we-are/>, diakses pada April 8, 17.

mendukung UDHR dan memperjuangkan hak asasi manusia di berbagai negara dengan bantuan para sukarelawan.

Aksi yang dilakukan oleh *Amnesty* salah satunya adalah aksi damai di daerah Dakota utara, Amerika Serikat dalam kasus *Dakota Access Pipeline* (DAPL). DAPL adalah pembuatan jalur pipa minyak dari Dakota Utara, melalui Dakota Selatan dan Iowa sampai ke Illinois yang dilakukan oleh perusahaan bernama *Energy Transfer* (ET). Namun jalur pipa ini mencaplok tanah dan situs-situs suci dan kuno milik warga pribumi, yaitu *Standing Rock Sioux Reservation*. Sejak awal bulan Juli 2016, aktivis lingkungan AS bergabung dengan Persatuan Pribumi Amerika melakukan upaya-upaya seperti menggugat perusahaan ET dalam rangka menolak kelanjutan pembangunan proyek tersebut. Warga Indian Sioux menyatakan bahwa proyek tersebut mengancam tempat-tempat suci mereka dan berefek buruk terhadap sumber air di sana.

Aktivis lingkungan sudah mengeluarkan pernyataan bahwa pipa ini akan berkontribusi dalam perubahan iklim yang disebabkan oleh manusia dengan membangun infrastruktur untuk minyak negara. Mereka mendesak untuk tetap menyimpan bahan bakar fosil dalam tanah dengan tujuan melindungi dunia dari efek buruk perubahan iklim. Mantan presiden Barack Obama sempat menghentikan pembangunan proyek ini karena mendapat desakan dari berbagai pihak dan membangun jalur pipa ini artinya menambah risiko perubahan iklim yang berkebalikan dengan janji serta tujuan pemerintahannya. Obama bahkan sempat menggelar *hearing* yang dihadiri ratusan masyarakat Tribal untuk menunjukkan dukungan terhadap suku asli Amerika ini. Dalam pidatonya, Obama mengatakan bahwa dia mendukung sepenuhnya hak masyarakat Indiana sesuai yang telah disepakati pada perjanjian Fort Laramie dan bahwa Obama sangat

mengapresiasi usaha masyarakat Sioux untuk menolak pembangunan pipa DAPL serta mereka telah didengar.

Namun menurut pihak pembangun Akses Dakota, *Energy Transfer Partner*, proyek jalur pipa senilai US\$3,8 miliar ini sangat penting. Jika rampung, jalur pipa sepanjang 1.886 kilometer ini akan melintasi empat negara bagian dan diperkirakan dapat membawa hampir setengah juta barel minyak mentah dari North Dakota ke Illinois.<sup>7</sup> Para pendukung proyek ini berpendapat bahwa jika produsen minyak dihentikan, itu akan tidak berguna karena juga sudah banyak produksi minyak yang dilakukan di Dakota Utara—argumen yang sama dengan Keystone XL yang mereka berikan kepada publik. *Energy Transport Partners*, perusahaan di balik pembangunan proyek tersebut, mengatakan penyaluran minyak lewat pipa lebih aman dibanding mengangkutnya dengan kereta api atau melalui kendaraan. Mereka juga mengatakan pembangunan pipa ini juga akan meningkatkan ekonomi setempat. Sebagaimana Dakota Utara memang menjadi negara bagian Amerika Serikat dengan tingkat ekonomi paling rendah dan angka pengangguran yang cukup tinggi dibandingkan dengan negara bagian lainnya.

Sedangkan bagi para oposisi, pembangunan jalur pipa Dakota Access Pipeline bukan merupakan usaha untuk meningkatkan perekonomian melainkan hanyalah usaha korporasi untuk memperkaya diri mereka sendiri. *United States Army Corps of Engineer* (USACE) merupakan badan pemerintah yang salah satu tugasnya adalah melakukan tinjauan lingkungan terhadap seluruh infrastruktur dan atau

---

<sup>7</sup> Sam Levin, *Dakota Access pipeline: the who, what and why of the Standing Rock protests*, <https://www.theguardian.com/us-news/2016/nov/03/north-dakota-access-oil-pipeline-protests-explainer>, diakses April 8, 17.

bangunan yang akan dibangun di negara perserikatan Amerika Serikat. Dalam pembangunan jalur pipa DAPL ini, USACE juga melakukan tinjauan lingkungan dan dengan cepat memberikan izin untuk melanjutkan pembangunan. Hal ini membuat banyak pakar lingkungan serta para pemerhati lingkungan menganggap bahwa USACE tidak melakukan tinjauan yang memadai dan kurang detil. Sebab, pembangunan jalur pipa DAPL jika sesuai dengan rute yang diajukan akan melewati Sungai Missouri, Sungai Cannon Ball dan Danau Oahe dan ketiganya merupakan sumber air utama bagi masyarakat sekitar. Risiko pembangunan pipa terlalu besar apalagi jika dipertimbangkan akan terjadinya kebocoran. Pembangunan pipa ini sendiri akan mengakibatkan peningkatan polusi udara yang diperkirakan mencapai 100 juta ton CO<sub>2</sub> dalam waktu setahun. Jika terjadi kebocoran, maka sumber air utama milik suku Standing Rock Sioux tidak dapat diselamatkan. Air yang sudah terkontaminasi membutuhkan waktu yang lama dan biaya yang banyak untuk menghilangkan racun didalamnya. Sungai yang tercemar juga akan mempengaruhi kehidupan didalamnya, ikan serta tumbuhan yang tumbuh disana akan terkontaminasi. Sungai merupakan sumber air serta sumber makanan bagi suku Sioux, jika keduanya hilang maka kualitas hidup mereka akan berkurang secara signifikan.

Rute DAPL yang diajukan oleh *Energy Transfers* akan melewati Danau Oahe, hanya 500 meter dari Sungai Missouri, tempat tinggal suku Standing Rock Sioux. Penduduk Standing Rock menyatakan bahwa pembangunan DAPL melanggar *Fort Laramie Treaty* yang menjamin penduduk tanah reservasi, dapat tinggal dan menggunakan wilayah mereka tanpa gangguan dari pihak manapun. Selain itu, Sioux menyatakan bahwa rute jalur pipa ini akan melewati situs suci bagi mereka. Bagi suku Sioux yang menganut animisme, tanah yang akan dilewati oleh rute DAPL adalah tanah suci

yang biasa mereka gunakan untuk beribadah. Salah satu tokoh Standing Rock Sioux, Floris White Bull, dalam satu wawancaranya dengan The Guardian menyatakan “Those are our Eiffels, our pyramids.” Menunjukkan betapa pentingnya tanah tersebut bagi para leluhur serta masyarakat Sioux. Jika pembangunan dilanjutkan, maka artinya pemerintah akan melanggar *National Historic Preservation Act* yang merupakan undang-undang perlindungan situs sejarah Amerika Serikat.

Air dan tempat tinggal yang layak merupakan salah dua dari kebutuhan hidup manusia yang mendasar, hal ini juga sudah tertera dalam UDHR pasal Pasal 3 yang di dalamnya berbunyi setiap orang berhak atas penghidupan, kebebasan dan keselamatan individu. Sudah banyak protes yang dilakukan baik oleh penduduk asli (*Standing Rock Sioux*) maupun organisasi-organisasi yang bergerak dalam bidang kemanusiaan dan lingkungan. Pada prosesnya juga banyak terjadi pelanggaran atas HAM dan hukum internasional dimana para polisi dan militer melemparkan gas air mata, berlaku secara keji dan melukai para demonstran damai.<sup>8</sup> *Amnesty International* yang juga merupakan organisasi yang bergerak untuk memperjuangkan hak asasi manusia ikut andil dalam protes ini.

Skripsi ini akan menjelaskan mengenai upaya-upaya yang dilakukan oleh *Amnesty International* sebagai INGOs yang bergerak dalam bidang kemanusiaan dalam kasus *Dakota Access Pipeline* di Amerika Serikat yang sedang marak dibicarakan saat skripsi ini ditulis dan atau diterbitkan. Skripsi ini akan mengambil sisi argumentatif yang dikuatkan dengan

---

<sup>8</sup> Sam Levin, *Dakota Access pipeline protests: UN group investigates human rights abuses*, <https://www.theguardian.com/us-news/2016/oct/31/dakota-access-pipeline-protest-investigation-human-rights-abuses>, diakses pada April 8, 17.

pendapat ahli dan pengamat serta akan diperkuat dengan pernyataan dari berbagai jurnal dan buku bahwa NGO merupakan aktor yang memiliki kekuatan untuk mempengaruhi pembuatan kebijakan dalam lingkup negosiasi internasional. Dengan pendukung yang tersebar dari berbagai negara dan upaya-upaya pendukungnya untuk membantu penduduk asli Amerika, organisasi *Amnesty International* menindaklanjuti kasus *Dakota Access Pipeline*.

Namun pergantian presiden Amerika Serikat, dari Barack Obama ke Donald Trump, sebagaimana yang diketahui memiliki watak dan cara kepemimpinan yang berbeda dari presiden AS yang sebelumnya, motif-motif pemerintah dan korporasi dibalik pembangunan jalur pipa *Dakota Access Pipeline* serta banyaknya perubahan pada politik pemerintahan AS menjadi salah satu hambatan bagi *Amnesty* dalam menyukkseskan kampanye mereka. Bagaimana cara *Amnesty International* melakukan upaya-upaya untuk mempengaruhi kebijakan pemerintah Amerika Serikat pada kasus *Dakota Access Pipeline* yang tidak hanya merugikan penduduk asli namun juga berpeluang untuk memperburuk perubahan iklim inilah yang akan dibahas pada skripsi ini.

## **B. Rumusan Masalah**

Dari penjelasan di atas maka dapat diambil sebuah rumusan masalah sebagai berikut;

Bagaimana *Amnesty International* sebagai organisasi non-pemerintah internasional mempengaruhi kebijakan pemerintah Amerika Serikat pada kasus *Dakota Access Pipeline*?

### C. Landasan Teori

#### 1. *Empowerment at the grassroots* (Philip Eldridge)

Dalam menjelaskan peranan *Non-Governmental Organizations* pada pergerakannya di politik internasional, Eldridge mengungkapkan 3 (tiga) kategori; *grassroots development*, *grassroots mobilization*, dan yang terakhir adalah *empowerment at the grassroots*. Ketiganya memiliki pendekatan yang berbeda dalam upayanya mempengaruhi kebijakan pemerintah. *Grassroots development* misalnya, adalah yang memiliki hubungan paling dekat dengan pemerintah. NGO yang termasuk dalam kategori ini biasanya lebih partisipatif dan pro terhadap kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah. Biasanya organisasi ini berkonsentrasi pada program pengembangan komunitas, seperti pembangunan irigasi, pusat kesehatan, pertanian, peternakan, kerajinan tangan dan bentuk pembangunan ekonomi lainnya.

Sementara NGO pada kategori *grassroots mobilization* lebih bersifat netral. Mereka biasanya berpihak sebagai penengah antara masyarakat dan pihak pemerintahan, cenderung bersifat advokatif guna memobilisasi masyarakat untuk mendapatkan dukungan dalam kehidupan politik. Kategori yang terakhir, *empowerment at the grassroots* merupakan kategori NGO yang cenderung paling ‘radikal’ karena NGO ini biasanya kontra terhadap kebijakan pemerintah dan tidak berniat untuk melakukan kerjasama dengan pemerintah. Mereka beranggapan bahwa segala hal buruk dan merugikan yang terjadi pada masyarakat merupakan hasil dari kesalahan pengambilan kebijakan oleh pemerintah. Konsentrasi NGO ini ada pada hal-hal seputar ekologi, hak asasi manusia, status perempuan, hak terkait dengan penguasaan dan kompensasi tanah, pengamanan hak sewa untuk pedagang kecil, dan lain-lain.<sup>9</sup> Pada kategori ini,

---

<sup>9</sup> Eldridge, Philip. *Non-Governmental Organizations and the Role of State in Indonesia*. Paper presented to the Conference on The State

NGO menginginkan perubahan yang dilakukan langsung dari pergerakan oleh masyarakat yang hak-haknya tidak terpenuhi.

Dalam suatu pernyataan, Eldridge menyatakan bahwa peluang keterlibatan dalam politik tingkat tinggi terbuka secara lebar bagi NGO. keterlibatan ini diperlukan bagi para NGO untuk mempertahankan hubungan dekat dengan *grassroots reality*. dimana tetap dibutuhkan hubungan dengan pemerintah sebagai *policy makers* bagi tuntutan rakyat.<sup>10</sup>

Organisasi *Amnesty International* (AI) berdiri dengan memusatkan perhatian mereka pada perjuangan Hak Asasi Manusia (HAM). HAM merupakan hak paling mendasar yang harus dimiliki oleh setiap individu di dunia, dikutip dari moto berdirinya AI, "...when the United Nations Universal Declaration of Human Rights is a reality for the world's people, will our work be done."<sup>11</sup> Penegakan HAM mereka lakukan dalam bentuk kampanye, membentuk petisi-petisi, menggalang dana dan melakukan protes secara besar-besaran dalam lingkup internasional. Dari hal-hal berikut ini dapat dilihat bahwa AI merupakan NGO dalam kategori *empowerment at the grassroots* yang menggerakkan masyarakat untuk memperjuangkan hak-hak mereka sendiri. *Mobilization NGO* seperti *Amnesty International* memiliki tujuan utama yaitu mendidik dan memobilisasi orang-orang terkait masalah ekologi, hak asasi manusia, status perempuan,

---

and Civil Society in Contemporary Indonesia, Nov. 1988. Center for Southeast Asian Studies, Dept. Indonesian and Chinese Studies, Monash University, Australia.

<sup>10</sup> Harper, Caroline, 1997. " USING GRASSROOTS EXPERIENCE TO INFORM MACRO LEVEL POLICY: AN NGO PERSPECTIVE." *Journal of International Development*. Vol. 9, No. 5, 771±778.

<sup>11</sup> Amnesty International, *Who we are*, <https://www.amnesty.org/en/who-we-are/>, diakses pada April 8, 17.

dan hak-hak legal yang pada intinya merupakan hak mendasar yang harus dimiliki oleh seorang individu.<sup>12</sup>

2. *Productive power* (Barnett and Duvall)

*Power* merupakan konsep dasar dari hubungan internasional, memiliki *power* sebagai aktor dalam politik internasional berarti memiliki kekuatan dalam menentukan nasib dan keadaan mereka sendiri. Istilah *power* sendiri sebenarnya memiliki banyak definisi yang tidak dapat disentralkan serta sulit untuk diukur. Beberapa ilmuwan menyatakan *power* adalah konsep yang sulit dipahami dan hal ini menjadi hambatan yang signifikan bagi kemajuan ilmu sosial.<sup>13</sup> Salah dua dari ilmuwan tersebut adalah yang Michael Barnett dan Raymond Duvall membagi *power* menjadi 4 kategori, yaitu; *compulsory power*, *institutional power*, *structural power* dan *productive power*.

*Compulsory power* terjadi ketika suatu aktor memiliki kontrol secara langsung atas aktor lainnya. Sebagai contoh, ketika negara A dapat mengontrol negara B untuk melakukan sesuatu diluar kehendak negara B seperti meminta pergantian kebijakan atau lainnya. *Institutional power* berlaku jika suatu aktor melakukan kontrol secara tidak langsung atas aktor lain. Seperti namanya, *power* ini adalah ketika suatu negara merancang suatu institusi internasional yang memberikan keuntungan jangka panjang untuk negara mereka sendiri dan kerugian untuk negara lain. Sedangkan pada *structural power*,

---

<sup>12</sup> Barlow, Colin. "Resource Management in Asia-Pacific" *NGOs in Development: tales from outer island Indonesia*. Working paper no. 12, October 1996.

<sup>13</sup> Gruber, Lloyd." *Power in Global Governance* edited by Michael Barnett and Raymond Duvall. Cambridge: Cambridge University Press, 2005.

kekuatan ini menyangkut pada konstitusi dari kapasitas sosial dan kepentingan dari aktor yang memiliki hubungan langsung terhadap satu sama lain. Pada kategori terakhir, *productive power* adalah kekuatan yang muncul sebagai akibat dari berkumpulnya seluruh subjek sosial dengan berbagai kekuatan sosial. Kekuasaan produktif berasal dari masyarakat yang menggunakan kekuasaan secara maksimal dengan proses sosial yang menyebar.<sup>14</sup>

Definisi *productive power* dan *structural power* cenderung tumpang tindih dalam beberapa hal penting. Namun kekuatan struktural dan produktif berbeda dalam hal yang sangat penting; yang pertama bekerja melalui hubungan struktural langsung dan yang kedua (kekuatan produktif) memerlukan proses sosial yang lebih umum dan menyebar. *Productive power* dapat digambarkan sebagai produksi subyek melalui hubungan sosial yang menyebar di mana *productive power* adalah kumpulan dari subjek sosial dengan berbagai kekuatan sosial yang meluas melalui sistem pengetahuan. Konsep ini memusatkan perhatian kepada “discourse- seperti HAM, kesetaraan gender, dan demokrasi-”<sup>15</sup> Bentuk kekuatan produktif ini kaitannya dengan produksi wacana, ide, gagasan dan pengetahuan dalam sistem sosial untuk mendukung suatu kepentingan tertentu.

Kasus *Dakota Access Pipeline* diangkat oleh *Amnesty International* sebagai permasalahan yang perlu ditangani karena berdampak pada kesejahteraan masyarakat asli Dakota

---

<sup>14</sup> Barnett, Michael and Raymond Duvall. “Power in International Politics.” In *International Organization* 59 no. 1 (Winter 1995): 39-75.

<sup>15</sup> Barnett, Michael and Raymond Duvall, 2005. “Power in Global Governance.” *Power in Global Governance*, edited by Michael Barnett and Raymond Duvall, Cambridge: Cambridge University Press.

Utara, *Standing Rock*. AI bersama dengan pengamat lingkungan dan pengamat HAM menggandeng penduduk asli untuk bekerjasama melawan pembangunan akses pipa ini. *Standing Rock Sioux* yang tadinya tidak dapat berbuat apapun ketika pipa ini mulai dibangun akhirnya mendapatkan tempat untuk menyalurkan aspirasi kepada pemerintah dengan bantuan AI dan seluruh organisasi yang bersangkutan. Hal ini merupakan contoh dari *productive power* dimana kekuatan terbentuk oleh berbagai aktor sosial dengan perbedaan latar belakang untuk menyebarkan isu dan membuat isu ini menjadi wacana hingga proyek *Dakota Access Pipeline* menjadi sorotan dunia internasional. AI dan Human Rights Watch sebagai organisasi yang memperjuangkan HAM menyuarakan bahwa air dan tempat tinggal yang layak merupakan salah satu hak individu yang tidak boleh dihiraukan sementara pembangunan pipa membahayakan akses air penduduk sekitar. Organisasi-organisasi lain, seperti EarthJustice, Green Peace Internasional yang merupakan organisasi lingkungan pun turut membantu dan menyuarakan ketidaksetujuan pembangunan ini dengan target para pemerhati dan aktivis peduli lingkungan. Dengan kekuatan organisasi masing-masing dan target yang dituju serta bagaimana isu ini dibentuk oleh para aktor, kemudian disebarakan hingga menjadi suatu wacana maka kasus ini sangat tepat untuk dianalisis dengan menggunakan teori *productive power*.

#### **D. Argumen Penelitian**

1. Penelitian ini berargumen bahwa *Amnesty International* menyuarakan kasus *Dakota Access Pipeline* dengan cara menggerakkan masyarakat *Standing Rock Sioux* untuk menuntut hak-hak dasar mereka. Untuk itu, konsep *empowerment at the grassroots* merupakan konsep yang tepat untuk mengkategorikan NGO ini.
2. Penelitian ini berpendapat bahwa *productive power* berlaku pada kasus *Dakota Access Pipeline* karena kasus ini diangkat oleh berbagai aktor seperti *Amnesty International*, penduduk

asli *Standing Rock Sioux Reservation* dan berbagai aktor internasional maupun domestik lainnya. Meluasnya kasus pipa dakota ini disebabkan oleh banyaknya kekuatan yang terkumpul dari berbagai aktor dengan latar belakang yang bervariasi.

#### **E. Tujuan Penulisan**

1. Tulisan ini bertujuan untuk menganalisis fenomena peralihan aktor pada hubungan internasional dengan menggunakan teori hubungan internasional pada kasus *Dakota Access Pipeline*.
2. Tulisan ini bertujuan untuk menghubungkan konsep *productive power* dalam pengangkatan kasus DAPL oleh *Amnesty International*.

#### **F. Jangkauan Penelitian**

Jangkauan penelitian pada karya tulis ini adalah pengaruh organisasi non-pemerintah *Amnesty International* pada pembuatan kebijakan pemerintah Amerika Serikat dalam kasus *Dakota Access Pipeline*. Serta bagaimana upaya yang dilakukan oleh AI dengan bersatu bersama *Standing Rock* untuk memeberhentikan pembangunan akses pipa dakota yang mengancam kerusakan lingkungan di sekitar tempat konstruksi. Mengacu pada jangkauan penelitian tersebut, penulis membatasi tahun penelitian yaitu pada tahun 2016 hingga tahun 2017.

#### **G. Metode Penelitian**

Metode penelitian yang digunakan oleh penulis dalam menulis karya tulis ini adalah metode kualitatif yang bersifat eksplanasi. Metode kualitatif merupakan metode penelitian yang memiliki paradigma fenomenologi, sehingga proses penelitiannya lebih menekankan pada analisa fenomena tertentu, termasuk fenomena hubungan internasional. Dalam pengumpulan data, penulis menggunakan analisis data

sekunder yaitu melalui publikasi/buku, internet atau media lainnya, termasuk persyaratan yang perlu dipenuhi.

## H. Sistematika Penulisan

Untuk memperjelas bahasan pada karya tulis ini, maka penulis membagi empat bab bahasan dengan susunan sebagai berikut:

Bab I menjelaskan mengenai latar belakang *Amnesty International* sebagai lembaga non-pemerintah dalam mempengaruhi kebijakan Amerika Serikat pada kasus *Dakota Access Pipeline* di Dakota Utara, rumusan masalah, landasan teori, hipotesa, tujuan penelitian, jangkauan penelitian, metodologi penelitian, dan sistematika penulisan.

Bab II menjelaskan mengenai *Dakota Access Pipeline* secara rinci dari sejarah awal mulanya hingga pembangunannya dari konteks sosial-politik. Penulis juga menjelaskan bagaimana pro dan kontra yang ditimbulkan oleh konstruksi DAPL pada penduduk asli Indian, *Standing Rock*, pemerintah, berbagai organisasi internasional yang terlibat, salah satunya *Amnesty International*, dan masyarakat dunia.

BAB III akan membahas lebih rinci mengenai *Amnesty International* dan aktor-aktor transnasional lain yang terlibat pada upaya pemberhentian proyek DAPL. Penulis akan menganalisis dampak konstruksi DAPL pada lingkungan sekitar pembangunan proyek dan bagaimana hal itu juga akan berpengaruh pada tergerusnya kebudayaan penduduk suku *Standing Rock Sioux* dengan implementasi teori-teori hubungan internasional pada kasus *Dakota Access Pipeline*.

Bab IV berisi rangkuman dari keseluruhan bab yang disusun dalam bentuk kesimpulan, menjawab hipotesa dan rumusan

masalah pada BAB I, dan menjadi penutup dalam karya tulis ini.